

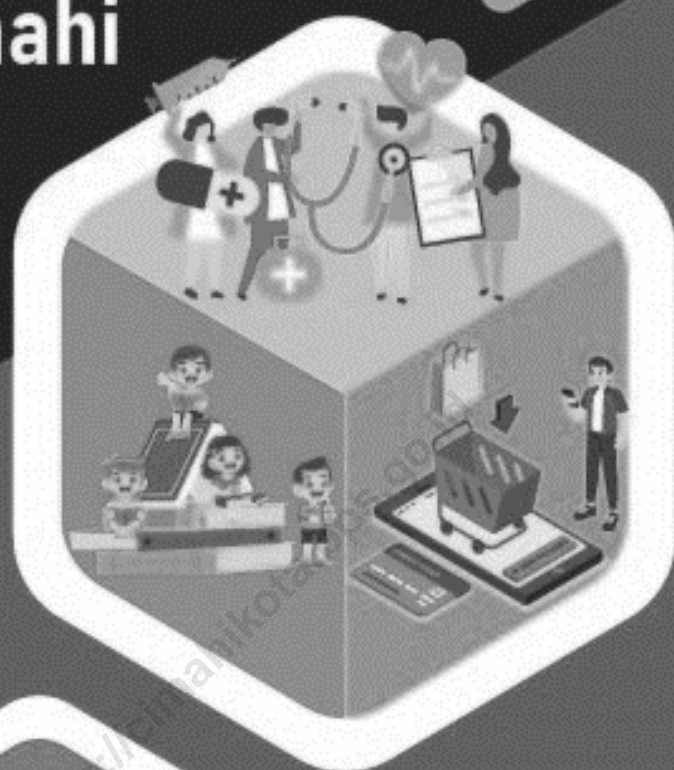
Indeks Pembangunan Manusia Kota Cimahi



2020



Indeks Pembangunan Manusia Kota Cimahi



2020

Indeks Pembangunan Manusia Kota Cimahi 2020

ISSN/ISBN : 978-602-70979-9-5

No. Publikasi: 32770.2005

Katalog: 4102002.3277

Ukuran Buku: 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman: x + 48 halaman

Naskah:

BPS Kota Cimahi

Penyunting:

BPS Kota Cimahi

Desain Kover oleh:

BPS Kota Cimahi

Penerbit:

BPS Kota Cimahi

Pencetak:

-

Sumber Ilustrasi:

Freepik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun
Indeks Pembangunan Manusia
Kota Cimahi 2020

Pengarah :

Dra. Tien Trina Sulistiawati

Editor :

Nadhifa Fikriyah, S.Tr.Stat.

Agus Suwono, B.St

Bimo Nugroho, S.ST

Penulis :

Nadhifa Fikriyah, S.Tr.Stat.

Pengolah Data :

Nadhifa Fikriyah, S.Tr.Stat.

Desain dan Tata Letak :

Nadhifa Fikriyah, S.Tr.Stat.

Kata Pengantar

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas izin dan pertolonganNya, Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Cimahi 2020 dapat diselesaikan tepat waktu. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang diukur berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Cimahi 2020 menggambarkan tentang capaian pembangunan manusia Kota Cimahi dengan metode penghitungan IPM terbaru. Data dan informasi yang disajikan terdiri dari situasi pembangunan manusia dari hasil penghitungan besaran IPM beserta indeks komponen-komponen penyusunnya serta perkembangannya.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik yang diperlukan oleh instansi/dinas pemerintahan, kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Aamiin.

Cimahi, Agustus 2020

Kepala Badan Pusat Statistik

Kota Cimahi



Ir. Sitti Sarah



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	6
BAB II Metodologi	9
2.1 Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia	11
2.2 Variabel dalam IPM Metode Baru	11
2.3 Menghitung Indeks Komponen IPM	13
2.4 Menghitung pertumbuhan IPM	14
2.5 Klasifikasi indeks pembangunan manusia	15
2.6 Sumber Data	15
BAB III IPM Kota Cimahi	17
BAB IV Tinjauan Indikator IPM Kota Cimahi	23
4.1 Kesehatan	25
4.2 Pendidikan	33
4.3 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	42
BAB V Kesimpulan	43
Lampiran	47



Daftar Tabel

Tabel 2.1	Nilai Minimum dan Maksimum IPM Metode Baru	14
Tabel 2.2	Klasifikasi Capaian IPM	15
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kota Cimahi, 2019	38
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kota Cimahi, 2019	39

<https://cimahikota.bps.go.id>

Daftar Gambar

Gambar 3.1	IPM Kota Cimahi, 2015-2019	19
Gambar 3.2	Pertumbuhan IPM Kota Cimahi, 2015-2019	20
Gambar 3.3	IPM dan Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019	21
Gambar 4.1	Angka Harapan Hidup Kota Cimahi, 2015-2019	26
Gambar 4.2	Angka Harapan Hidup dan Pertumbuhan AHH Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019	28
Gambar 4.3	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Cimahi, 2019	29
Gambar 4.4	Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Cimahi, 2019	29
Gambar 4.5	Persentase Baduta (Bawah Dua Tahun) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI di Kota Cimahi, 2019	30
Gambar 4.6	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2019	32
Gambar 4.7	Rata-Rata Lama Sekolah dan Pertumbuhan RLS di Kota Cimahi, 2015-2019	34
Gambar 4.8	Harapan Lama Sekolah dan Pertumbuhan HLS di Kota Cimahi, 2015-2019	35
Gambar 4.9	Rata-rata Lama Sekolah dan Pertumbuhan RLS Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019	36
Gambar 4.10	Harapan Lama Sekolah dan Pertumbuhan HLS Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019	37
Gambar 4.11	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kota Cimahi, 2019	40

Gambar 4.12	Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Cimahi, 2019	41
Gambar 4.13	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan dan Pertumbuhan PPP di Kota Cimahi, 2015-2019	43
Gambar 4.14	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan dan Pertumbuhan PPP Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019	44

<https://cimahikota.bps.go.id>

Daftar Lampiran

Tabel 1	IPM dan Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019	47
Tabel 2	Angka Harapan Hidup dan Pertumbuhan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019	47
Tabel 3	Rata-Rata Lama Sekolah dan Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019	47
Tabel 4	Harapan Lama Sekolah dan Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019	48
Tabel 5	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan dan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019	48

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

HUMAN DEVELOPMENT INDEX

Indeks Pembangunan Manusia merupakan Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Manfaat IPM

01

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia

02

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara

03

Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan DAU

Indikator IPM

KESEHATAN



PENDIDIKAN



STANDAR HIDUP LAYAK






1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang


Pembangunan yang bijak bagi masyarakat adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumberdaya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, dibentuklah Agenda 2030 yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs mencakup tujuh belas tujuan, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang



Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.


Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Jadi pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja. Namun, pembangunan ekonomi memiliki hubungan dua arah dengan kesehatan. Pembangunan ekonomi mempengaruhi kesehatan populasi, sebaliknya kesehatan populasi mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kesehatan merupakan sumberdaya yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Tingkat kesehatan populasi yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan keluarga, yang secara agregat nasional meningkatkan Produk Domestik Bruto per Kapita. Sebaliknya pembangunan ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan keberlanjutan sistem pendukung yang diperlukan bagi populasi untuk menciptakan kesehatan dan kualitas hidup yang baik. Pembangunan ekonomi menggunakan sumberdaya alam, energi, dan sumberdaya manusia secara masif. Pembangunan ekonomi yang tidak terkontrol, penggunaan sumberdaya alam dan energi untuk produksi maupun konsumsi, yang tidak berhati-hati, hingga melebihi kapasitas bumi, dapat merusak kondisi lingkungan sosial dan eko-sistem, sehingga menurunkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup populasi.



Kebijakan pemerintah dalam mencapai kesejahteraan haruslah dimulai dengan melihat manusia sebagai tujuan pembangunan yang berada di tengah lingkaran pembangunan, bukan manusia yang menunggu hasil dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Kemudian muncullah konsep pembangunan manusia yang diharapkan dapat memperbaiki kelemahan dari konsep pertumbuhan ekonomi yang hanya memperhitungkan pendapatan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. Pembangunan manusia juga dapat diartikan sebagai sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak dan masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator.

Indikator yang telah diakui seluruh dunia untuk mengukur tingkat pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia




yang lebih luas dan berada pada inti makna pembangunan. Pendidikan memainkan peran dalam membentuk kemampuan masyarakat disuatu negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, serta sebagai penentu keberhasilan pendidikan. Oleh karenanya peran kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi di suatu negara atau wilayah. Kebijakan pembangunan tanpa mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat suatu daerah tertinggal dari daerah yang lebih maju. IPM merupakan wujud dari komitmen tujuan nasional yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

1.2 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau biasa disebut dengan *Human Development Index* (HDI) merupakan indikator penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. IPM adalah suatu indeks komposit yang didasarkan pada tiga indikator yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Adapun manfaat dari IPM antara lain sebagai berikut:

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

- 
- c. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan DAU.

Sebagai ukuran komposit tunggal, IPM merupakan tingkatan status pembangunan manusia di suatu wilayah yang kemudian akan berfungsi sebagai patokan dasar perencanaan jika dibandingkan antarperiode untuk memberikan gambaran kemajuan dari suatu periode ke periode berikutnya dan juga memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan suatu wilayah relatif terhadap wilayah lain. Untuk lebih memberikan petunjuk tentang status pembangunan manusia di suatu wilayah sebagai alat ukur kompleks, IPM harus dikaitkan dengan setiap indikator komponennya dan berbagai indikator lain yang relevan.

Dalam perencanaan, pemanfaatan IPM terbatas hanya sebagai patokan dasar. Oleh karena itu, untuk perumusan kebijakan yang lebih terarah, diperlukannya suatu kajian tentang pembangunan manusia di suatu wilayah agar dapat memberikan petunjuk yang jelas tentang arah kebijakan pembangunan di masa akan datang. Analisis kondisi pembangunan manusia dapat dibuat dengan memanfaatkan indikator-indikator pembentukan IPM.

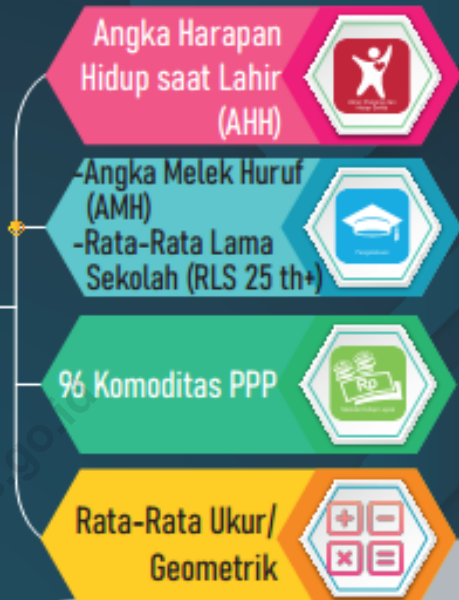
<https://cimahikota.bps.go.id>

PERBANDINGAN METODE LAMA DAN METODE BARU IPM

METODE LAMA



METODE BARU



DIMENSI IPM METODE BARU

Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH)

Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Pengeluaran

Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

KLASIFIKASI CAPAIAN IPM

Rendah
 $60 < \text{IPM}$

Sedang
 $60 \leq \text{IPM} < 70$

Tinggi
 $70 \leq \text{IPM} < 80$

Sangat Tinggi
 $\text{IPM} \geq 80$

<https://cimahikota.bps.go.id>

2 Metodologi

2.1 Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia sudah diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. Kemudian, indeks pembangunan manusia telah dikembangkan dan yang terakhir adalah penyempurnaan penyusunan IPM menggunakan metode baru pada tahun 2014. Penyempurnaan metodologi IPM pada tahun 2014 meliputi:

1. mengganti tahun dasar PNB perkapita dari 2005 menjadi 2011
2. mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik

Sedangkan indikator yang berubah adalah:


1. angka melek huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan}} \times 100$$

2.2 Variabel dalam IPM Metode Baru

1. Harapan hidup saat lahir – AHH (*life expectation* – e_0)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan



suatu masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penghitungan AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010.

2. Rata-rata lama sekolah – RLS (mean years od schooling – MYS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

3. Harapan lama sekolah – HLS (Expected Years of Schooling – EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

4. Pengeluaran per kapita disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata

pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao. Rumus hitung paritas daya beli sebagai berikut:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left[\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right]^{1/m}$$

Keterangan:

P_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

P_{ik} : harga komoditas i di provinsi ke k

m : jumlah komoditas

2.3 Menghitung Indeks Komponen IPM

a. Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

b. Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

c. Dimensi Pengeluaran

$$I_{hidup layak} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

Nilai maksimum dan nilai minimum yang digunakan dalam penghitungan indeks-indeks di atas, terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Nilai Minimum dan Maksimum IPM Metode Baru

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka harapan hidup saat lahir	Tahun	20	20	85	85
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per kapita disesuaikan		100 (PPP US \$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP US \$)	26.572.352** (Rp)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu Kabupaten Tolikara (Papua)

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (RPJPN) yaitu perkiraan per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

2.4 Menghitung pertumbuhan IPM

Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian pada suatu waktu dengan capaian pada waktu sebelumnya. Semakin

tinggi nilai pertumbuhan, maka semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimal.

$$\text{pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

2.5 Klasifikasi indeks pembangunan manusia

Capaian indeks pembangunan manusia di suatu wilayah yang telah dihitung, kemudian akan diklasifikasikan ke dalam empat kategori. Klasifikasi capaian IPM sebagai berikut (UNDP,2010):

Tabel 2.2 Klasifikasi Capaian IPM


No	Klasifikasi	Capaian IPM
1	Sangat tinggi	$IPM \geq 80$
2	Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
3	Sedang	$60 \leq IPM < 70$
4	Rendah	$IPM < 60$

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.6 Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penghitungan IPM sebagian besar bersumber dari data SUSENAS, khususnya data untuk menghitung indeks kesehatan dan indeks pendidikan. Berikut ini adalah data-data yang dibutuhkan:

- Angka harapan hidup saat lahir (sensus penduduk 2010, Proyeksi Penduduk).
- Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (SUSENAS).

- 
- c. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran perkapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.
 - d. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

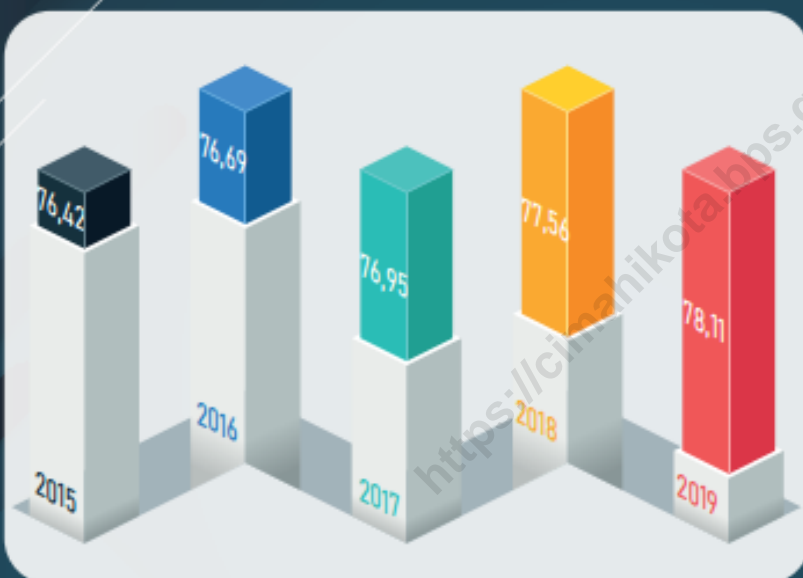
<https://cimahikota.bps.go.id>

IPM KOTA CIMAH I TAHUN 2019

IPM 2019

Pada tahun 2019, IPM Kota Cimahi mencapai 78,11 tahun dengan peringkat 4 di Provinsi Jawa Barat dan masuk pada kategori tinggi

78,11

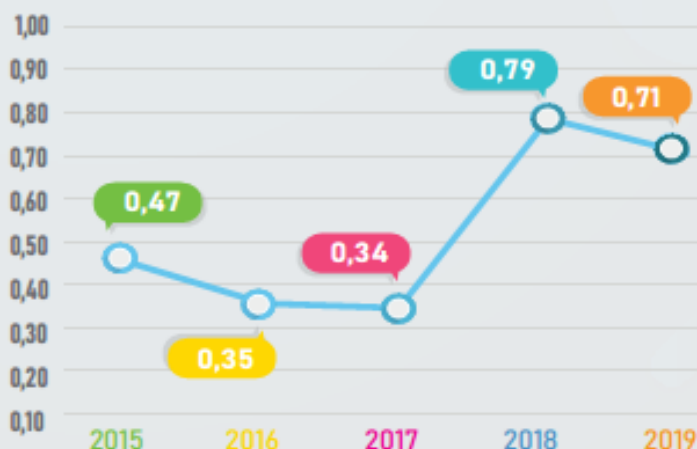


IPM 2015-2019

Sejak tahun 2015 hingga 2019, IPM Kota Cimahi selalu mengalami peningkatan.

Pertumbuhan IPM

Pertumbuhan IPM di Kota Cimahi pada tahun 2015 hingga 2019 berfluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018, kemudian melambat pada tahun 2019





<https://cimahikota.bps.go.id>



3 IPM Kota Cimahi

Kualitas hidup manusia di Kota Cimahi pada tahun 2019 terus mengalami peningkatan dan mampu melampaui IPM Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2019, IPM Kota Cimahi mencapai 78,11, sedangkan IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 72,03. Capaian IPM Kota Cimahi ini berada di peringkat keempat di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 3.1 IPM Kota Cimahi, 2015-2019

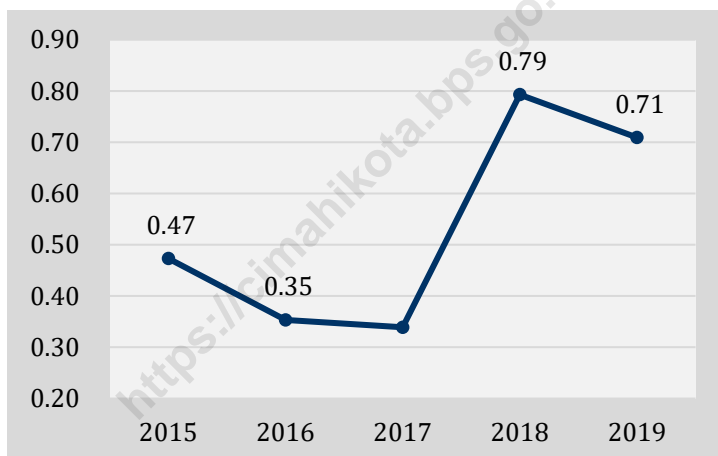


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan gambar 3.1, IPM Kota Cimahi dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, IPM Kota Cimahi sebesar 76,42, kemudian pada tahun 2016 sebesar 76,69, pada tahun 2017 mencapai 76,95, lalu meningkat lagi menjadi 77,56 pada tahun 2018, dan mencapai 78,11 pada tahun 2019. Peningkatan IPM Kota Cimahi pada tahun 2019 sebesar 0,55 dibanding tahun 2018.

Sedangkan dibanding tahun 2015 telah mengalami peningkatan sebesar 1,69. Capaian IPM Kota Cimahi ini berada pada kategori tinggi, karena berada pada range 70 – 80. Perkembangan capaian ini menandakan bahwa upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia di Kota Cimahi terus berjalan dengan baik hingga saat ini. Fokus pemerintah perlu dilakukan saat ini adalah upaya mempercepat pembangunan manusia agar kualitas manusia dalam memacu perekonomian manusia semakin maju.

Gambar 3.2 Pertumbuhan IPM Kota Cimahi, 2015-2019



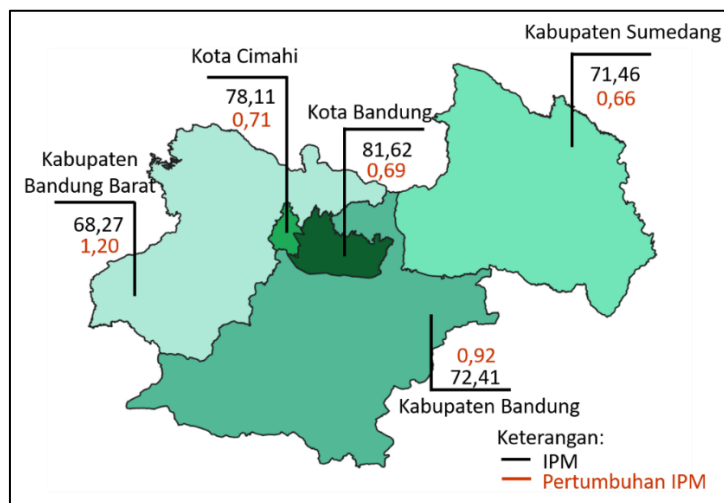
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2015-2019 IPM Kota Cimahi terus mengalami pertumbuhan yang positif. Namun, terdapat beberapa tahun yang cenderung mengalami perlambatan pada pertumbuhannya. Pada tahun 2015 pertumbuhan IPM Kota Cimahi sebesar 0,47, kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2016 menjadi 0,35, lalu mengalami perlambatan lagi pada tahun 2017 menjadi 0,34. Pada tahun 2018 pertumbuhan IPM Kota Cimahi mengalami percepatan hingga mencapai 0,79 sekaligus menjadi pertumbuhan tertinggi dalam


5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan lagi menjadi 0,71. Adanya perlambatan ini patut dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melihat setiap dimensi dari IPM. Hal ini bertujuan agar pada tahun selanjutnya, pembangunan manusia bisa lebih baik dan mengalami percepatan pertumbuhan.

Bandung Raya terdiri dari 5 kabupaten/kota yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Tiga dari lima kabupaten/kota di Bandung Raya memiliki IPM pada kategori tinggi, karena berada pada range 70-80. Sedangkan Kota Bandung berada pada kategori sangat tinggi dan Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori sedang. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Bandung Raya, maka Kota Cimahi memiliki IPM yang cukup tinggi, yakni berada di posisi kedua setelah Kota Bandung. IPM Kota Cimahi dan Kota Bandung memiliki selisih yang cukup dekat yakni sebesar 3,51.

Gambar 3.3 IPM dan Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat



Pertumbuhan IPM Kota Cimahi berada di posisi ketiga jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Bandung Raya. Posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Bandung Barat dengan pertumbuhan sebesar 1,20. Di posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Bandung dengan pertumbuhan sebesar 0,92. Selanjutnya yang ketiga adalah Kota Cimahi dengan pertumbuhan sebesar 0,71. Kemudian diikuti oleh Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang dengan pertumbuhan IPM masing-masing sebesar 0,69 dan 0,66.

<https://cimahikota.bps.go.id>

INDIKATOR IPM KOTA CIMAHI TAHUN 2019



73,89

Angka Harapan Hidup

Berarti rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seorang bayi baru lahir di Kota Cimahi adalah 73,89 tahun



10,95

Rata-Rata Lama Sekolah

Berarti penduduk Kota Cimahi usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,95 tahun atau hampir menamatkan kelas 2 SMA.



13,79

Harapan Lama Sekolah

Berarti rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seorang bayi baru lahir di Kota Cimahi adalah 13,79 tahun



12.448

Standar Hidup Layak

Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita disesuaikan di Kota Cimahi mencapai Rp 12.448,00.

<https://cimahikota.bps.go.id>

4 Tinjauan Indikator IPM Kota Cimahi

Indeks pembangunan manusia dibentuk dari beberapa indikator di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Agar dapat melihat perkembangan pembangunan manusia di Kota Cimahi, maka perlu dilakukan pemahaman terkait perkembangan pada masing-masing indikator pembentuk IPM. Berikut diuraikan gambaran dari setiap indikator IPM di Kota Cimahi.

4.1 Kesehatan

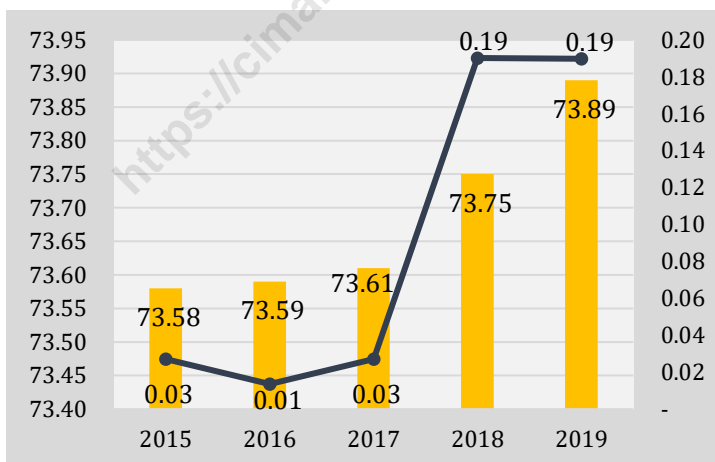
Memiliki umur yang panjang merupakan keinginan setiap orang. Untuk dapat memiliki umur yang panjang, diperlukan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, kesehatan juga menentukan kualitas hidup manusia. Untuk mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat yang baik, pemerintah menyusun program kesehatan dalam RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan RPJMN 2020-2024 di bidang kesehatan ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Menurut H.L.Blum, untuk menciptakan kondisi sehat, maka diperlukan suatu keharmonisan dalam menjaga kesehatan tubuh. Kondisi sehat yang dimaksud bukan saja kondisi sehat secara fisik melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat. Terdapat empat faktor utama yang memengaruhi derajat kesehatan

masyarakat. Keempat faktor ini terdiri dari faktor perilaku/gaya hidup (*life style*), faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor pelayanan kesehatan (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor genetik (keturunan).


Indikator angka harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Angka harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun, kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan angka harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup Kota Cimahi, 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Angka harapan hidup mencerminkan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seorang bayi baru lahir di suatu wilayah. Misalnya pada tahun 2019, angka harapan hidup Kota Cimahi mencapai 73,89 berarti rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seorang bayi



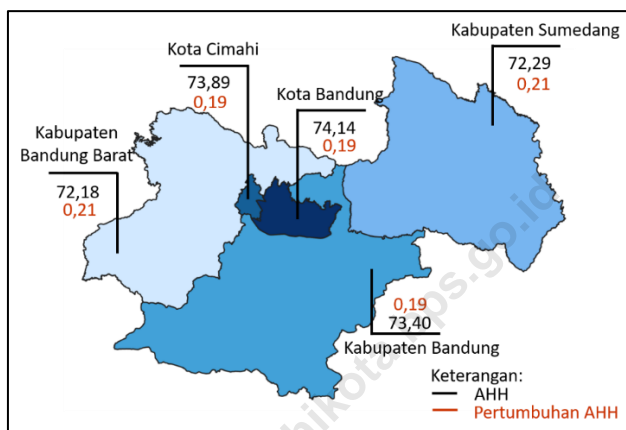
baru lahir di Kota Cimahi adalah 73,89 tahun. Berdasarkan gambar 4.1, angka harapan hidup di Kota Cimahi dalam lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Meskipun, pada tahun 2016 mengalami perlambatan pertumbuhan dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,01 persen. Sehingga pada tahun 2016 angka harapan hidup Kota Cimahi hanya naik sedikit menjadi 73,59 dibanding tahun sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 73,58. Kemudian pada tahun 2017 mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 0,03 persen. Sehingga angka harapan hidup Kota Cimahi menjadi 73,61.

Pada tahun 2018 terjadi percepatan pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 0,19 persen. Sehingga angka harapan hidup Kota Cimahi menjadi 73,75. Pada tahun 2019, mengalami pertumbuhan yang sama dengan tahun sebelumnya yakni 0,19 persen. Sehingga angka harapan hidup Kota Cimahi meningkat menjadi 73,89 tahun. Dengan semakin meningkatnya angka harapan hidup, maka hal ini menjadi tanda bahwa derajat kesehatan masyarakat Kota Cimahi semakin tinggi pula. Hal ini dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah.

Pada gambar 4.2 dapat dilihat perbandingan angka harapan hidup Kota Cimahi dengan kabupaten/kota sekitarnya. Kota Cimahi memiliki angka harapan hidup tertinggi kedua setelah Kota Bandung yang bernilai 74,14. Kemudian pada posisi ketiga ditempati oleh Kabupaten Bandung dengan angka harapan hidup sebesar 73,40. Lalu keempat terdapat Kabupaten Sumedang dengan angka harapan hidup sebesar 72,29. Terakhir yakni Kabupaten Bandung Barat memiliki angka harapan hidup sebesar 72,18. Berdasarkan gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa wilayah kota cenderung memiliki angka harapan hidup yang relatif lebih tinggi dibanding wilayah

kabupaten. Atau dengan kata lain, tingkat keberhasilan dari program kesehatan yang dijalankan di wilayah kota cenderung lebih tinggi dibanding wilayah kabupaten.

Gambar 4.2 Angka Harapan Hidup dan Pertumbuhan AHH Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019



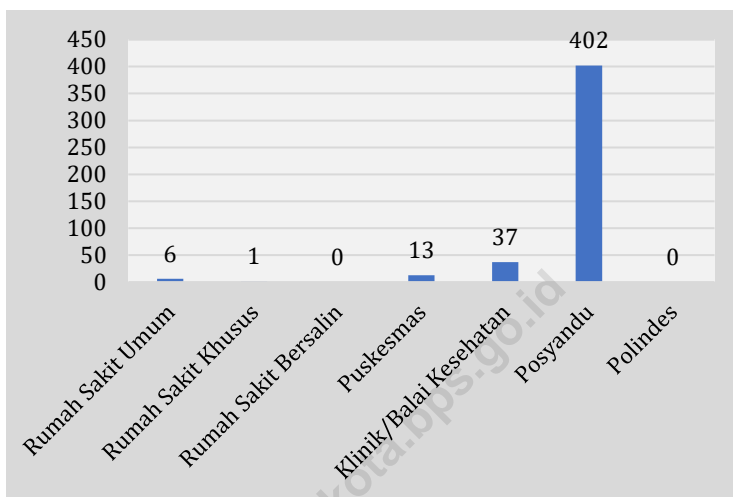
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Fasilitas kesehatan merupakan suatu alat penunjang kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Kota Cimahi memiliki beberapa fasilitas kesehatan diantaranya adalah rumah sakit umum, rumah sakit khusus, puskesmas, klinik/balai kesehatan, dan posyandu.

Berdasarkan gambar 4.3, jumlah rumah sakit umum yang ada di Kota Cimahi sebanyak enam unit. Keenam rumah sakit ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Cimahi yakni Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Utara. Satu unit rumah sakit khusus berada di Kecamatan Cimahi Utara. Rumah sakit bersalin dan polindes pada tahun 2019 belum tersedia di Kota Cimahi. Puskesmas, klinik/balai kesehatan, dan posyandu yang masing-masing berjumlah 13 unit, 37 unit, dan 402 unit sudah

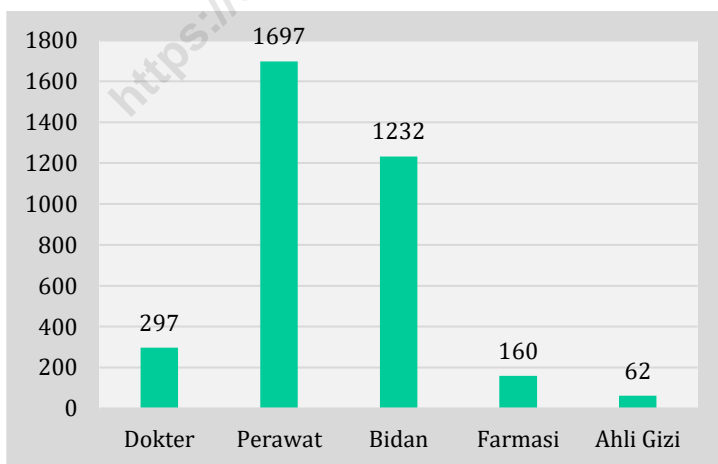
tersedia di setiap kecamatan di Kota Cimahi. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan mudah untuk mengaksesnya.

Gambar 4.3 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Cimahi, 2019



Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka, 2020

Gambar 4.4 Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Cimahi, 2019

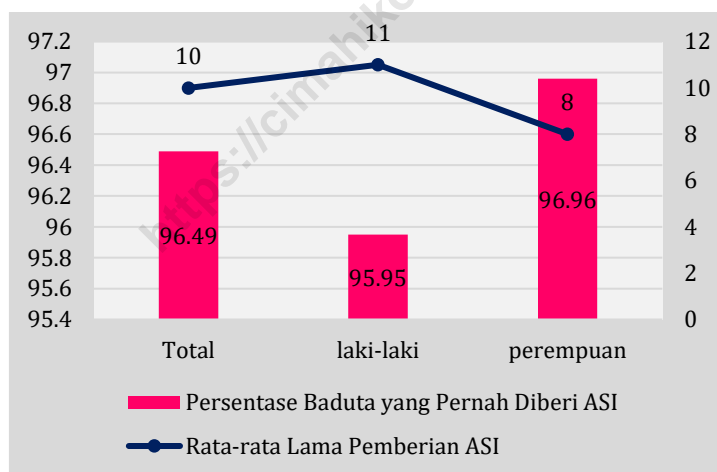


Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka, 2020

Sedangkan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di Kota Cimahi pada tahun 2019 cukup banyak, dapat dilihat pada gambar 4.4. Tenaga kesehatan ini terdiri dari 297 dokter, 1697 perawat, 1232


bidan, 160 ahli farmasi, dan 62 ahli gizi. Dengan jumlah tenaga kesehatan yang memadai, tentu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih baik dan optimal. Begitu juga pelayanan terhadap ibu hamil dan bayi juga akan lebih baik karena jumlah bidan yang tersedia di Kota Cimahi cukup banyak. Bidan merupakan tenaga kesehatan yang bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Sehingga dengan adanya bidan dapat membantu mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

Gambar 4.5 Persentase Baduta (Bawah Dua Tahun) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI di Kota Cimahi, 2019



Sumber: Statistik Kesejahteraan Jawa Barat, 2019

Pada masa bayi merupakan masa yang rentan karena belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri sedangkan dia tetap membutuhkan gizi untuk tumbuh kembangnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi gizi seorang bayi adalah dengan pemberian asi eksklusif selama enam bulan dan

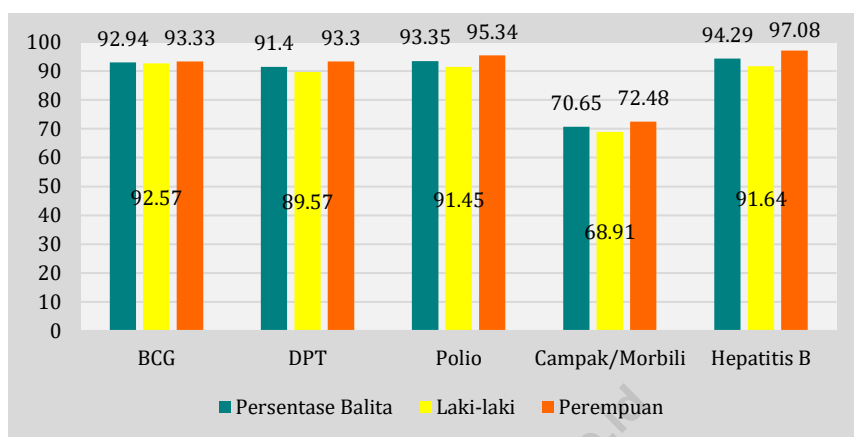


dianjurkan untuk dilanjutkan sampai dengan anak berusia dua tahun atau lebih dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai (Keputusan Menteri Kesehatan No 450/MENKES/SK/VI/2004).

Pemberian asi terhadap baduta di Kota Cimahi tahun 2019 cukup tinggi yakni mencapai 96,49 persen. Baduta dengan jenis kelamin laki-laki memiliki capaian sebesar 95,95 persen, sedikit lebih rendah dibanding baduta perempuan yang mencapai 96,96 persen. Sedangkan untuk rata-rata lama pemberian asi di Kota Cimahi mencapai 10 bulan. Hal ini menandakan bahwa baduta di Kota Cimahi telah mendapat asi eksklusif yakni selama enam bulan. Meskipun masih belum mencapai dua tahun seperti anjuran dalam keputusan menteri kesehatan. Untuk baduta laki-laki memiliki rata-rata pemberian asi mencapai 11 bulan, sedangkan baduta perempuan memiliki capaian yang lebih rendah yakni 8 bulan. Capaian ini menunjukkan bahwa perlu adanya usaha yang lebih untuk meningkatkan rata-rata pemberian asi pada anak sampai berusia dua tahun.


Memasuki masa balita maka akan terjadi proses tumbuh kembang yang begitu cepat. Hal ini juga menjadi faktor keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di masa mendatang. Namun, masa balita ini juga masa yang rawan terhadap berbagai macam penyakit. Karena pada masa balita, seorang anak belum memiliki daya tahan tubuh yang sempurna. Untuk membantu membantu meningkatkan kekebalan seorang anak terhadap suatu penyakit maka dilakukan imunisasi. Imunisasi ini berguna agar ketika anak terpapar suatu penyakit maka dia tidak akan ikut sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Gambar 4.6 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2019



Sumber: Statistik Kesejahteraan Jawa Barat, 2019

Persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi di Kota Cimahi cukup tinggi, yakni mencapai 90 persen untuk setiap jenis imunisasi, kecuali imunisasi campak/morbili yang hanya mencapai 70 persen. Balita yang pernah mendapat imunisasi BCG mencapai 92,94 persen, dengan capaian balita perempuan sebesar 92,57 persen dan balita laki-laki sebesar 93,33 persen. Imunisasi BCG berfungsi sebagai pencegah terhadap penyakit tuberkulosis. Balita yang pernah mendapat imunisasi DPT sebesar 91,40 persen, dengan capaian balita perempuan mencapai 89, 57 persen dan balita laki-laki sebesar 93,30 persen. Imunisasi DPT ini berfungsi untuk mencegah tiga penyakit, yakni difteri, pertusis, dan tetanus. Balita yang pernah mendapatkan imunisasi polio di Kota Cimahi mencapai 93,35 persen, dengan capaian balita perempuan sebesar 91,45 persen dan balita laki-laki mencapai 95,34 persen. Imunisasi polio ini berfungsi untuk melindungi diri dari poliomyelitis atau infeksi polio.



Balita yang pernah mendapatkan imunisasi campak/morbili sebesar 70,65 persen, dengan capaian balita perempuan sebesar 68,91 dan balita laki-laki sebesar 72,48 persen. Imunisasi campak/morbili berfungsi untuk mencegah penyakit campak. Kemudian balita yang pernah mendapatkan imunisasi hepatitis B mencapai 94,29 persen, dengan capaian balita perempuan sebesar 91,64 persen dan balita laki-laki sebesar 97,08 persen. Imunisasi hepatitis B ini berfungsi untuk mencegah penyakit hepatitis B. Namun dengan capaian persentase yang tinggi di masing-masing jenis imunisasi ini belum menjamin setiap balita telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Sehingga perlu adanya usaha untuk menggalakan imunisasi secara lengkap. Dengan begitu angka harapan hidup dapat terus ditingkatkan.

4.2 Pendidikan

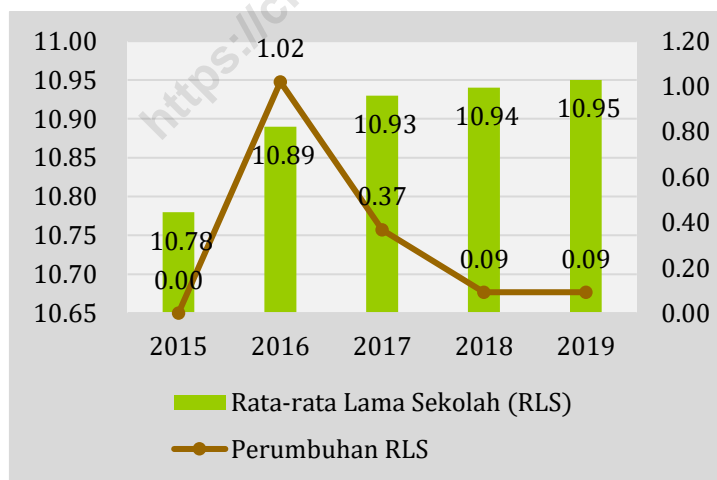
Pendidikan dalam kehidupan manusia merupakan bagian kebutuhan yang penting, karena pendidikan diharapkan mampu mengubah peserta didik agar menjadi manusia terdidik sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut UU No 20 tahun 2003, pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kualitas pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan manusia. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dibanding

seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. peningkatan kualitas pendidikan juga akan mendorong perbaikan pada kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi.

Untuk mewujudkan kualitas pendidikan masyarakat yang lebih baik, pemerintah menyusun program kesehatan dalam RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan RPJMN 2020-2024 di bidang pendidikan ini adalah membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Terdapat dua indikator yang digunakan untuk menghitung IPM, yakni rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kedua indikator ini sekaligus berfungsi untuk mengukur keberhasilan program yang dijalankan pemerintah.

Gambar 4.7 Rata-Rata Lama Sekolah dan Pertumbuhan RLS di Kota Cimahi, 2015-2019



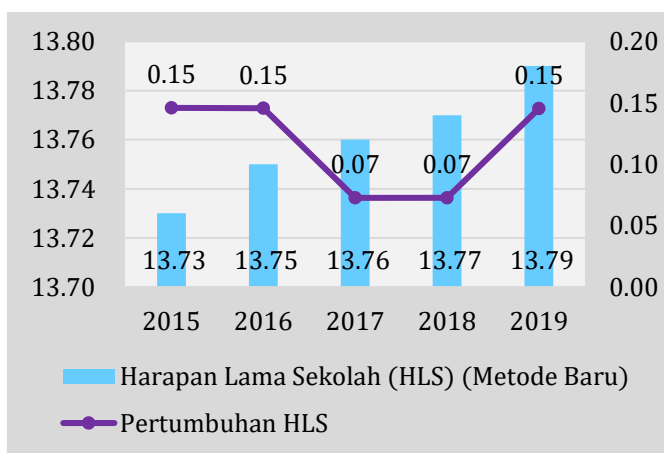
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Indikator berikutnya dalam indeks pembangunan manusia adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan

jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Lima tahun terakhir yakni sejak 2015 sampai 2019, rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi terus mengalami peningkatan, meskipun pertumbuhan pada tahun 2017 samapi 2019 terus mengalami perlambatan. Pada gambar 3.7, rata-rata lama sekolah pada tahun 2019 mencapai 10,95 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Cimahi usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,95 tahun atau hampir menamatkan kelas 2 SMA.

Capaian ini tentu belum sesuai dengan program pemerintah yakni Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditulis dalam Permen Dikbud No 19 tahun 2019 bahwa usia wajib belajar adalah enam tahun sampai dengan 21 tahun atau tamat satuan pendidikan menengah sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun. Maka diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar rata-rata lama sekolah Kota Cimahi mencapai 12 tahun.

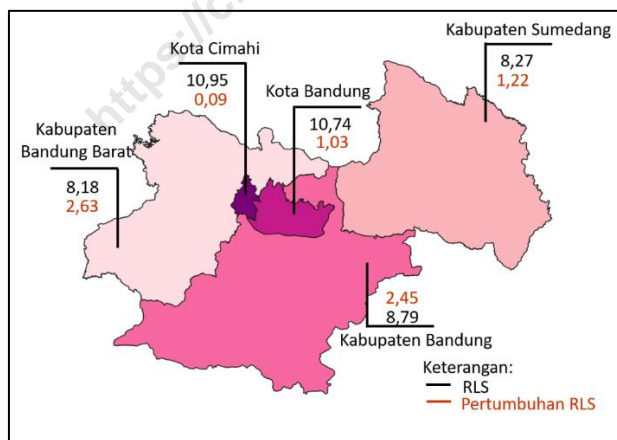
Gambar 4.8 Harapan Lama Sekolah dan Pertumbuhan HLS di Kota Cimahi, 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Indikator lain dalam hal pendidikan adalah harapan lama sekolah. Angka harapan lama sekolah ini menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yakni program wajib belajar. Berdasarkan gambar 4.8 angka harapan lama sekolah di Kota Cimahi terus meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, angka harapan lama sekolah di Kota Cimahi mencapai 13,79 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2019 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,78 tahun atau setara dengan Diploma I.

Gambar 4.9 Rata-rata Lama Sekolah dan Pertumbuhan RLS Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019

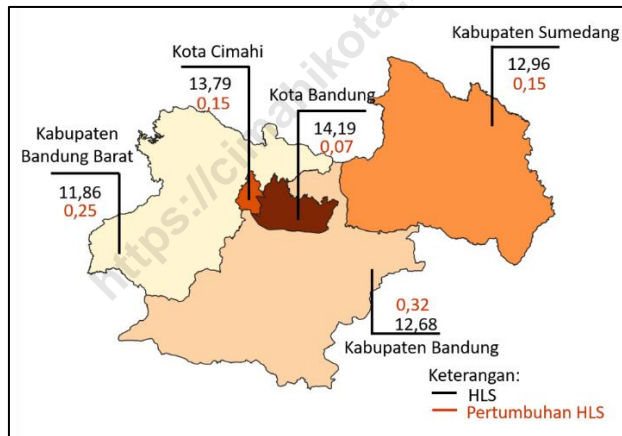


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Bandung Raya (Gambar 4.9), Kota Cimahi memiliki capaian rata-rata lama sekolah yang paling tinggi yakni sebesar 10,95 tahun. Diikuti oleh Kota

Bandung dengan rata-rata lama sekolah yang sedikit di bawah Kota Cimahi yakni sebesar 10,74 tahun. Kemudian Kabupaten Bandung dengan capaian rata-rata lama sekolah sebesar 8,79 tahun. Lalu Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat yang berbeda tipis dengan rata-rata lama sekolah masing-masing 8,27 tahun dan 8,18 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8 tahun atau sudah menamatkan kelas 2 SMP.

Gambar 4.10 Harapan Lama Sekolah dan Pertumbuhan HLS Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Pada gambar 4.10, dapat dilihat perbandingan angka harapan lama sekolah kabupaten/kota di Bandung Raya. Harapan lama sekolah paling tinggi dimiliki oleh Kota Bandung yakni sebesar 14,19 tahun. Kemudian, Kota Cimahi dengan angka harapan lama sekolah sebesar 13,79 tahun. Lalu, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat dengan angka harapan lama sekolah yang berdekatan yakni

12,96 tahun dan 12,68 tahun. Terakhir yakni Kabupaten Bandung Barat dengan angka harapan lama sekolah sebesar 11,86 tahun, artinya secara rata-rata anak usia tujuh tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 di Kabupaten Bandung Barat memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,86 tahun atau setara dengan kelas 3 SMA.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kota Cimahi, 2019

Jenis Kelamin	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak Bersekolah Lagi
		SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Ke atas	
Laki-laki	3.08	11	4.37	11.18	70.37
Perempuan	3.72	11.15	4.01	7.98	73.14
Total	3.4	11.07	4.19	9.59	71.75

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Cimahi, 2019

Jika dilihat berdasarkan status pendidikan untuk penduduk 5 tahun ke atas di Kota Cimahi, terdapat sebanyak 3,40 persen penduduk yang tidak ataupun belum pernah bersekolah. Persentase penduduk perempuan yang tidak ataupun belum pernah bersekolah mencapai 3,72 persen, lebih tinggi dibanding persentase penduduk laki-laki yang sebesar 3,08 persen. Berikutnya terdapat 11,07 persen penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/ sederajat. Pada jenjang pendidikan berikutnya terdapat 4,19 persen penduduk dan 9,59 persen penduduk yang masih bersekolah di tingkat SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Kemudian sebanyak 71,75 persen penduduk sudah tidak bersekolah lagi.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kota Cimahi, 2019

Jenis Kelamin	Tidak Punya Ijazah SD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Ke atas
Laki-laki	4.09	13.71	25.11	57.1
Perempuan	8.43	19.46	24.52	47.6
Total	6.25	16.58	24.81	52.36

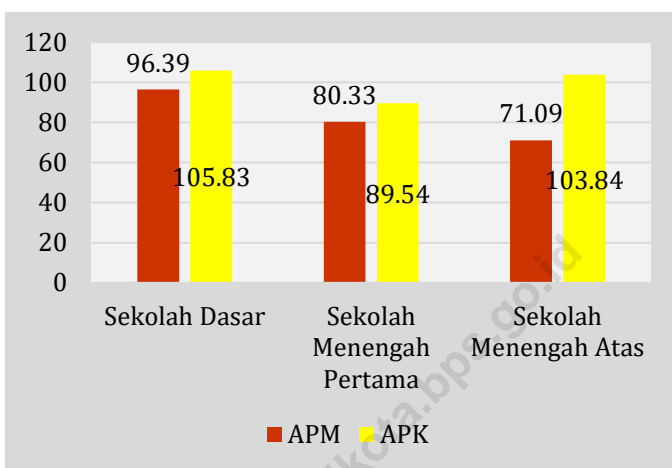
Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Cimahi, 2019

Pada tabel 4.2 dapat dilihat persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki. Persentase penduduk pada jenjang pendidikan SMA/ke atas mencapai 52,36 persen. Artinya 52,36 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Cimahi telah menamatkan jenjang pendidikan SMA/ke atas. Pada jenjang pendidikan ini, persentase penduduk laki-laki lebih banyak yakni 57,10 persen dibanding penduduk perempuan hanya 47,60 persen. Selain itu, pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi juga persentasenya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi juga kualitas dari pendidikan penduduk Kota Cimahi pada tahun 2019.

Angka partisipasi murni menunjukkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Berdasarkan gambar 4.11 semakin tinggi jenjang pendidikan, angka partisipasi murni justru semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi justru semakin rendah. Selain itu, angka partisipasi murni yang semakin jauh dari 100 persen maka

menunjukkan semakin rendahnya jumlah anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu.

Gambar 4.11 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kota Cimahi, 2019

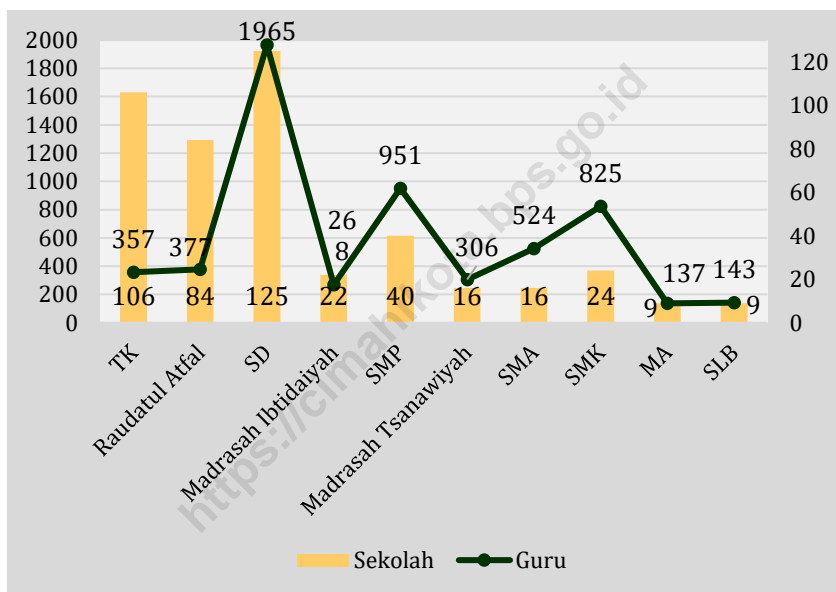


Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka, 2020

Angka partisipasi kasar menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Nilai angka partisipasi kasar dapat melebihi 100 persen, seperti pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah atas di gambar 4.11. Nilai angka partisipasi kasar yang mencapai 105,83 persen pada jenjang pendidikan sekolah dasar menunjukkan populasi murid yang bersekolah di SD mencakup anak di luar batas usia sekolah dasar. Hal serupa juga terjadi pada jenjang sekolah menengah atas di Kota Cimahi. Angka partisipasi kasar yang melebihi 100 ini bisa disebabkan adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas.

Selain itu, juga menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Sedangkan untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, angka partisipasi kasarnya sebesar 89,54 persen, yang artinya persentase penduduk 13-15 tahun di Kota Cimahi yang bersekolah di tingkat SMP sekitar 89,54 persen.

Gambar 4.12 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Cimahi, 2019



Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka, 2020

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka diperlukan fasilitas pendidikan yang memadai. Berdasarkan gambar 4.12 terlihat bahwa jumlah sekolah dan guru di setiap jenjang pendidikan sudah tersedia dan dengan jumlah yang cukup memadai. Terutama pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk menunjang program pemerintah yakni wajib belajar 12 tahun.

4.3 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

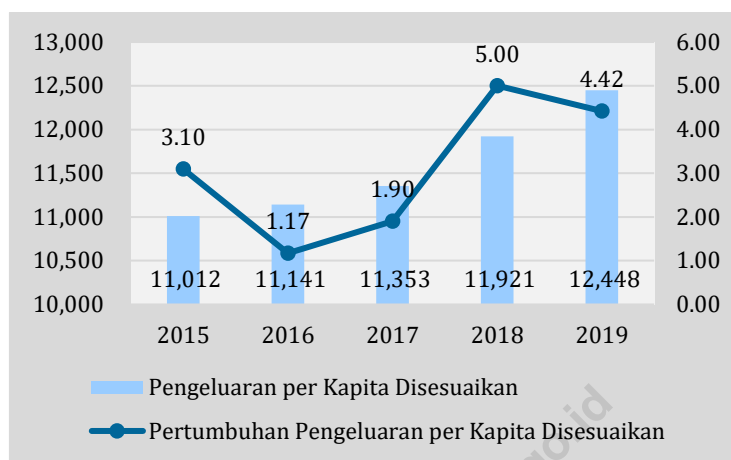
Data pengeluaran dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan.

Komponen IPM dari sisi ekonomi yang menjadi standar hidup layak yaitu pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli. Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Daya beli ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Kemampuan daya beli antar daerah tentu berbeda-beda. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan bisa diupayakan dengan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pengeluaran per kapita disesuaikan di Kota Cimahi sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita disesuaikan di Kota Cimahi mencapai Rp 12.448,00. Pengeluaran per kapita disesuaikan ini telah bertumbuh sebanyak 4,42 persen dibanding tahun 2018 yakni sebesar Rp 11.921,00.

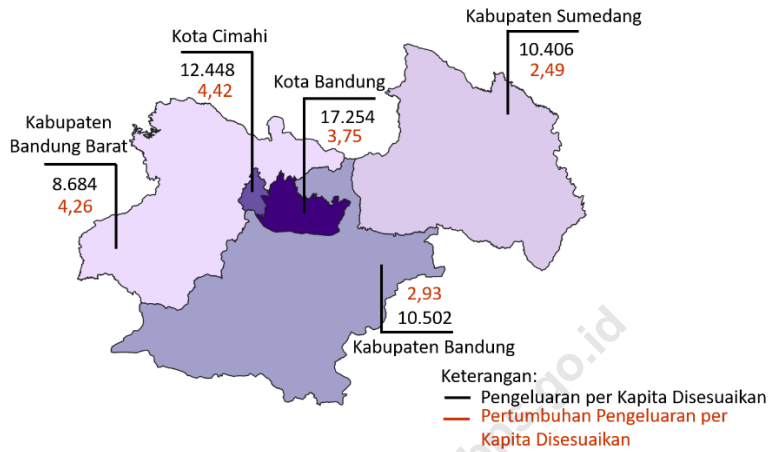
Gambar 4.13 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan dan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kota Cimahi, 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 5 persen dibanding tahun 2017 dengan pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar Rp 11.353,00. Peningkatan pengeluaran per kapita setiap tahunnya menunjukkan kondisi perekonomian penduduk Kota Cimahi semakin membaik serta variasi barang dan jasa yang mampu dibeli oleh masyarakat juga semakin beragam. Dapat dikatakan juga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Sehingga masyarakat akan semakin mampu untuk mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai.

Gambar 4.14 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan dan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Bandung Raya, Kota Cimahi berada di posisi kedua setelah Kota Bandung. Kota Bandung memiliki pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar Rp 17.254,00. Kemudian Kabupaten Bandung dengan pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar Rp 10.502,00. Lalu Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat dengan pengeluaran per kapita masing-masing sebesar Rp 10.406,00 dan Rp 8.684,00.


5 Kesimpulan

Pada periode 2015 hingga 2019, pembangunan manusia di Kota Cimahi terus mengalami peningkatan. Angka indeks pembangunan manusia Kota Cimahi pada tahun 2015 sebesar 76,42 kemudian terus mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya hingga mencapai 78,11 pada tahun 2019. Pertumbuhan IPM pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,71 persen.

Indeks pembangunan manusia di Kota Cimahi pada tahun 2019 mencapai peringkat 4 di Provinsi Jawa Barat. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Bandung Raya, IPM Cimahi pada tahun 2019 berada pada peringkat 2 setelah Kota Bandung. Capaian IPM Kota Cimahi ini berada pada kategori tinggi, karena berada pada range 70 – 80.

Masing-masing indikator IPM Kota Cimahi juga selalu mengalami peningkatan selama periode 2015 hingga 2019. Pada tahun 2019, angka harapan hidup di Kota Cimahi mencapai 73,89 tahun dengan pertumbuhan sebesar 0,19 persen dibanding tahun 2018. Indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masing-masing mencapai 10,95 tahun dan 13,78 tahun pada tahun 2019. Sedangkan untuk indikator pengeluaran per kapita disesuaikan pada tahun 2019 mencapai Rp 12.448,- dengan pertumbuhan sebesar 4,42 persen dibanding tahun 2018.

Peningkatan dari masing-masing indikator IPM tadi menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan ini menjadi hal penting dalam meningkatkan pembangunan manusia.



Berdasarkan tren IPM selama lima tahun terakhir, capaiannya masih berada pada kategori tinggi dengan range 70 hingga 80. Untuk mencapai kategori berikutnya yakni kategori sangat tinggi dengan range lebih dari 80, maka diperlukan upaya-upaya yang bersinergi. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Cimahi diharapkan mampu berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai angka IPM pada kategori sangat tinggi.

<https://cimahikota.bps.go.id>

Lampiran

Tabel 1. IPM dan Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019

No	Kabupaten/Kota	IPM	Pertumbuhan IPM
1	Kota Bandung	81,62	0,69
2	Kabupaten Bandung	72,41	0,92
3	Kabupaten Bandung Barat	68,27	1,2
4	Kota Cimahi	78,11	0,71
5	Kabupaten Sumedang	71,46	0,66

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 2. Angka Harapan Hidup dan Pertumbuhan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Pertumbuhan Angka Harapan Hidup
1	Kota Bandung	74,14	0,19
2	Kabupaten Bandung	73,4	0,19
3	Kabupaten Bandung Barat	72,18	0,21
4	Kota Cimahi	73,89	0,19
5	Kabupaten Sumedang	72,29	0,21

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 3. Rata-Rata Lama Sekolah dan Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah	Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah
1	Kota Bandung	10,74	1,03
2	Kabupaten Bandung	8,79	2,45
3	Kabupaten Bandung Barat	8,18	2,63
4	Kota Cimahi	10,95	0,09
5	Kabupaten Sumedang	8,27	1,22

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 4. Harapan Lama Sekolah dan Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah	Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah
1	Kota Bandung	14,19	0,07
2	Kabupaten Bandung	12,68	0,32
3	Kabupaten Bandung Barat	11,86	0,25
4	Kota Cimahi	13,79	0,15
5	Kabupaten Sumedang	12,96	0,15

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 5. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan dan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Bandung Raya, 2019

No	Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
1	Kota Bandung	17254	3,75
2	Kabupaten Bandung	10502	2,93
3	Kabupaten Bandung Barat	8684	4,26
4	Kota Cimahi	12448	4,42
5	Kabupaten Sumedang	10406	2,49

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA CIMAHI**

Jl. Entjep Kartawiria No. 20 B, Cimahi, Jawa Barat
Telp. (+62 - 22) 6645985
Homepage : cimahikota.bps.go.id
Email : bps3277@bps.go.id



ISBN 978-602-70979-9-5



9 786027 097995